



Pengembangan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDES Munggaran

Nadila Fauziah^{1*}, A. Bachrun Rifa'i²

¹Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*Email : nadilafauziah4@gmail.com

ABSTRAK

Hadirnya Bumdes berperan dalam mengembangkan usaha dan ekonomi masyarakat. Pada 6 tahun terakhir jumlah Bumdes di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat tetapi perkembangannya masih beragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi, hambatan dan keberhasilan program Bumdes Munggaran dalam upaya mengembangkan usaha dan ekonomi masyarakat di Desa Panumbangan. Adapun hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa Bumdes Munggaran telah membantu masyarakat melalui bantuan modal dan peralatan usaha, serta mengadakan pelatihan baik bagi pengurus dan masyarakat. Dalam implementasinya ada beberapa kendala seperti kurangnya modal, pengetahuan pengurus Bumdes yang masih terbatas, kurangnya partisipasi masyarakat. Tetapi Program Bumdes juga dapat dirasakan manfaatnya, ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat walaupun tidak signifikan, tumbuhnya kemandirian kelompok, dan peningkatan kepedulian masyarakat terkait upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin disekitarnya.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Bumdes, Implementasi, Hambatan, Indikator Keberhasilan

ABSTRACT

The presence of Bumdes plays a role in developing the community's business and economy. In the last 6 years the number of Bumdes in Indonesia has continued to increase every year but its development is still diverse. This study aims to find out how the implementation, obstacles and success of the Munggaran Bumdes program in an effort to develop the business and economy of the community in Panumbangan Village. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques used are interviews, observations, and documentation studies. The results of the research in the field show that the Munggaran Bumdes has helped the community through capital assistance and business equipment, as well as providing training for both administrators and the community. In its implementation there are several obstacles such

as lack of capital, limited knowledge of Bumdes management, lack of community participation. However, the benefits of the Bumdes Program can also be felt, marked by an increase in community income although it is not significant, the growth of group independence, and increasing public awareness related to efforts to improve the welfare of poor families around them.

Keywords : *Empowerment, bumdes, implementation, obstacles, success indicators*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sumber daya alamnya sangat kaya, rakyat Indonesia dapat sejahtera dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada berbagai potensi dari setiap daerah atau desa yang tentunya dapat dimanfaatkan, hal ini dilakukan guna memajukan taraf ekonomi keluarga. Tetapi kenyataannya, kesejahteraan masyarakat masih belum merata, terutama di pelosok desa. Kurang berkembangnya pembangunan ekonomi pedesaan hadir di berbagai wilayah oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kesejahteraan untuk mengurangi kemiskinan penduduk.

Pada hakikatnya pembangunan pedesaan merupakan tumpuan pembangunan nasional, jika setiap desa dapat berkembang secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah tercapai, dan indeks kesejahteraan rakyat Indonesia meningkat secara nasional.

Masyarakat pedesaan saat ini bekerja keras untuk mengelola sumber daya alam, dan rencana sumber daya alam ini berdampak positif pada peningkatan pendapatan pedesaan. Namun pada kenyataannya dalam pengembangan sumber daya alam, masyarakat desa dan aparat desa masih merasakan kendala yaitu masalah keuangan dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, yang membuat mereka tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut. Melihat fenomena tersebut, pemerintah telah mengupayakan dengan mendirikan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Istilah BUMDes dicantumkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). (Herawati, <https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/badan-usaha-milik-desa-status-dan-pembentukannya-92>, diakses tanggal 20 Juni 2021)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dioperasikan oleh masyarakat dan pemerintah desa yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Pemerintah Daerah tahun 2004, BUMDes didirikan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain itu, sebagai salah satu lembaga ekonomi di pedesaan, BUMDes harus berbeda dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Tujuannya agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Samadi, et.al 2015: 2)

Perkembangan BUMDES selama kurang lebih 6 tahun terus mengalami peningkatan jumlah. Tentunya dengan melihat fakta ini merupakan suatu hal positif, harapan kedepannya BUMDES dapat terus berkembang lebih baik dan juga unit-unit usaha yang ada dapat berkontribusi besar baik bagi pemerintah dan masyarakat desa. Sebagian besar masyarakat Desa Panumbangan mata pencahariannya adalah petani dan buruh tani, dan taraf hidup ekonominya masih sangat rendah. Desa Panumbangan memiliki potensi besar di bidang peternakan, pertanian, perkebunan, kerajinan tangan dan pengolahan pangan. Desa Panumbangan juga sudah memiliki BUMDES, Badan Usaha Desa Panumbangan didirikan sekitar tahun 2015 badan usaha ini diberi nama Badan Usaha Milik Desa Munggaran. Beberapa jenis unit usaha yang dijalankan BUMDES, yaitu : (1) Unit Usaha Bantuan Modal Bergulir. (2) Unit Usaha Ekonomi Produktif (Abon Ayam). (3) Kerjasama dengan pengusaha ternak.

BUMDES Munggaran ini sudah berjalan kurang lebih 6 tahun tetapi masih terlihat manfaat dari BUMDES ini belum dirasakan seluruh masyarakat desa. BUMDES belum dapat mensejahterakan seluruh masyarakat di Desa Panumbangan ini.

Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Panumbangan Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, fokus penelitiannya yaitu kepada BUMDES Munggaran. Bumdes ini menjalankan program pemberdayaan hingga saat ini, dan lokasi yang dekat dengan rumah peneliti menjadi faktor lain dalam pembuatan skripsi ini.

Metode yang digunakan peneliti ialah metode deskriptif. Dalam metode deskriptif ini dirancang untuk mendeskripsikan apa yang terjadi selama penelitian tentang bagaimana BUMDES Munggaran dalam mengimplementasikan program pemberdayaannya, faktor-faktor yang menjadi penghambat, dan keberhasilan BUMDES Munggaran dalam menjalankan programnya. Metode penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran, verifikasi dan penjelasan tentang fenomena yang diteliti. Untuk memperoleh informasi yang diperlukan, teknik yang diterapkan yaitu : (a) *Observasi*, yang diobservasi dalam penelitian adalah BUMDES Munggaran Desa Panumbangan yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang bagaimana BUMDES Munggaran dalam mengimplementasikan program pemberdayaannya, seperti apa faktor penghambat yang dialami BUMDES Munggaran dan keberhasilan yang telah dicapai BUMDES Munggaran. (b) *Wawancara*, dalam penelitian ini peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan kepada sejumlah responden yang dapat memberikan keterangan yang diperlukan oleh peneliti yaitu mengenai implementasi program, faktor penghambat dan keberhasilan BUMDES Munggaran. Responden yang di wawancarai yaitu

Pengurus BUMDES Munggaran, Kepala Desa, dan anggota masyarakat Desa Panumbangan yang tergabung di BUMDES Munggaran. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus sampai 18 Agustus 2021 satu kali pertemuan dengan masing-masing nara sumber. (c) *Studi Dokumentasi*, pada penelitian ini studi dokumentasi sebagai data pendukung dari kegiatan wawancara, observasi, serta untuk memperoleh kumpulan data seperti data peminjam bantuan modal bergulir BUMDES Munggaran, foto produk BUMDES Munggaran serta foto-foto kegiatan pelatihan.

LANDASAN TEORITIS

Di dalam landasan teori ini di paparkan beberapa teori diantaranya pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002: 243) mengatakan bahwa peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), seseorang dikatakan menjalankan suatu peranan berarti ia melaksanakan hak dan kewajibannya. Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang diberikan dalam suatu organisasi. (Lantaeda, 2017: 2)

Dalam peraturan Pemerintah No 11 tahun 2021 BAB I pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan didirikannya BUM Desa/ BUM Desa Bersama tercantum dalam PP No 11 tahun 2021 BAB I pasal 3, diantaranya: (1) Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta mengembangkan investasi dan produktivitas ekonomi serta potensi desa; (2) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan mengelola lumbung desa dengan menyediakan barang dan/atau jasa serta memenuhi kebutuhan masyarakat di desa; (3) Memperoleh keuntungan atau laba bersih dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Desa dan mengembangkan manfaat maksimal dari sumber daya ekonomi masyarakat Desa; (4) Memanfaatkan Aset Desa untuk menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan (5) Mengembangkan ekosistem digital di Desa.

Menurut Seyadi peran BUMDes ialah: (1) Membangun dan mengembangkan potensi serta kapasitas ekonomi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya secara keseluruhan. (2) Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. (3) BUMDes menjadi tumpuan penguatan ekonomi rakyat yang merupakan tumpuan kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. (4) upaya menciptakan dan mengembangkan perekonomian masyarakat pedesaan. (5) Membantu masyarakat

meningkatkan pendapatannya, sehingga masyarakat dapat sejahtera. (Seyadi, 2003: 16)

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah memperkuat kepemilikan faktor-faktor produksi, memperkuat kontrol distribusi dan pemasaran, memperkuat masyarakat untuk memperoleh upah/gaji yang cukup, dan memperkuat masyarakat terhadap informasi, pengetahuan dan keterampilan yang harus dilakukan dalam berbagai aspek, baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari aspek kebijaksanaannya (Hutomo, 2000: 3)

Dalam implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat ada beberapa dimensi pendekatan. Hutomo (2000:7-10) mengemukakan 5 pendekatan. *Pertama*, Bantuan modal Bergulir. Pemecahan dalam aspek modal merupakan hal yang penting dan memang harus dilakukan dalam proses pemberdayaan dalam bidang ekonomi. Permodalan menjadi salah satu penyebab usaha-usaha baru tidak muncul. Inti dari pemberdayaan adalah menciptakan kemandirian masyarakat. Salah satu cara untuk mengatasi masalah pendanaan usaha kecil, menengah dan mikro adalah dengan memberikan jaminan atas kredit mereka di lembaga keuangan yang ada atau memberi diskon untuk pinjaman mereka di lembaga keuangan.

Kedua, Bantuan Pembangunan Prasarana. Pembangunan infrastruktur produksi dan pemasaran merupakan hal penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penyediaan prasarana pemasaran dan atau transportasi dari tempat produksi ke pasar, dapat mengurangi rantai pemasaran maka penerimaan akan meningkatkan bagi petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Dari sisi pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur memiliki arti strategis yang besar dalam mendukung desa tertinggal.

Ketiga, Bantuan Pendampingan. Pendamping bertugas untuk memfasilitasi proses pembelajaran atau refleksi dan bertindak sebagai fasilitator untuk memperkuat kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Pengalaman pelaksanaan IDT, P3DT, dan PPK membuktikan bahwa biaya transaksi bantuan modal sangat mahal bila ada pendamping jarak jauh. Selain itu, pendamping eksitu yang dibayar membutuhkan banyak biaya pelatihan. Proses pemberdayaan masyarakat tidak hanya satu atau dua tahun tetapi proses selama puluhan tahun, sehingga perlu mempertimbangkan pendamping insitu untuk menjamin keberlanjutan pendampingan.

Keempat, Penguatan Kelembagaan. Dalam hal ini adalah adanya kemudahan bagi kelompok atau organisasi ekonomi dalam mendapatkan dana dari lembaga keuangan yang ada dan membangun skala usaha ekonomi. Kerja sama antara skala usaha dan jenis usaha, pasar komoditas, dan pasar input produksi adalah hal

penting yang harus diperbaiki dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kelima, Penguatan Kemitraan Usaha. Semua pihak akan dapat diberdayakan melalui kemitraan baik dalam permodalan, proses produksi, dan distribusi. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana usaha yang besar akan berkembang jika ada usaha kecil dan menengah, begitu pun sebaliknya usaha yang kecil akan dapat berkembang jika ada usaha yang besar dan usaha menengah. Keterkaitan antara usaha besar dengan usaha yang menengah dan kecil akan meningkatkan daya saing. Oleh karena itu dengan adanya keterkaitan produksi yang adil maka akan terbangunnya efisiensi.

Dalam Jurnal Ristiana dan Amin Yusuf (2020:99) Adamson (2013) mengatakan : dalam pemberdayaan, tingkat kapasitas masyarakat merupakan salah satu hambatan utama. salah satu hambatan utama untuk pemberdayaan adalah tingkat kapasitas masyarakat, istilah ini digunakan untuk menunjuk kemampuan anggota masyarakat untuk terlibat secara efektif dalam kegiatan kemitraan.

Faktor penghambat di bagi menjadi 2 jenis yaitu: *pertama*, Faktor penghambat dari dalam (internal) yaitu minimnya sumber daya manusia. *Kedua*, Faktor penghambat dari luar (eksternal) diantaranya minimnya anggaran dana yang disediakan dan kurangnya kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan dalam suatu kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Gunawan Sumodiningrat (Suciati, 2014:14) mengemukakan beberapa indikator keberhasilan program pemberdayaan ekonomi menurut yaitu : (1) Berkurangnya jumlah penduduk miskin. (2) Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. (3) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya. (4) peningkatan kemandirian kelompok dilihat dari berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, permodalan kelompok yang lebih kuat, makin system pengelolaan kelompok yang lebih rapi, dan interaksi yang lebih luas antara kelompok dengan kelompok lain dalam masyarakat. (5) peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan ditandai dari peningkatan pendapatan keluarga miskin yang dapat memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bumdes Munggaran di Desa Panumbangan ini berdiri pada tanggal 15 Juli 2015 dengan berlandaskan hukum pada PerDes No 8 tahun 2019. Pendirian Bumdes dilakukan melalui Musyawarah Desa dan beri nama BUMDES Munggaran dengan ketua yaitu ibu Rika Surtikaningsih. Bumdes Munggaran didirikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan taraf hidup

masyarakat melalui pemberdayaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di masyarakat. selain itu, Bumdes juga dapat memberikan sumbangsih bagi pendapatan asli desa.

Implementasi Program BUMDES Munggaran dalam Pengembangan Usaha dan Ekonomi Masyarakat

Impelementasi program pemberdayaan Bumdes Munggaran ini diawali dengan pengkajian potensi desa terlebih dahulu, kemudian didiskusikan melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa sebelum akhirnya melaksanakan implementasi program yang telah direncanakan.

Sebagaimana hasil wawancara tersebut beliau memaparkan bahwa:

“Sebelum melaksanakan program, tentunya kami mengawali dengan pengkajian potensi desa terlebih dahulu, kemudian mengadakan musyawarah dusun dan musyawarah desa, baru selanjutnya tahap implementasi program”. (Sumber: Wawancara dengan Ketua Bumdes Ibu Rika Surtikaningsih, Tanggal 14 September 2021)

Dalam proses implementasi pemberdayaan program Bumdes Munggaran ada beberapa pendekatan yang dilakukan, sesuai dengan teori Pendekatan dari Hutomo (2000: 7-10) yaitu: *Pertama*, Bantuan Modal Bergulir. Unit Usaha Bantuan Modal Bergulir ini hadir untuk menjawab permasalahan masyarakat Desa Panumbangan dalam masalah kesulitan mencari modal untuk memulai usaha atau mengembangkan usahanya, seperti hasil wawancara dengan Ibu Tetin, beliau sangat terbantu dengan adanya unit usaha ini karena persyaratannya cukup mudah hanya dengan KTP saja. Selain itu juga proses pencairannya pun tidak memakan waktu lama.

“saya sudah beberapa kali meminjam di bumdes untuk bantuan modal, pertama kali bergabung itu sekitar tahun 2015 neng ada sosialisasi dari desa dan uangnya untuk modal dagang sembako, alhamdulillah neng terbantu. Persyaratannya juga gak ribet seperti di bank” (Sumber: Wawancara dengan Ibu Tetin anggota Bantuan Modal Bergulir tanggal 16 September)

Program bantuan modal bergulir ini paling banyak diminati masyarakat Seperti yang dituturkan ibu Rika ketua BUMDES :

“ya neng unit usaha ini paling diminati, masyarakat lebih nyaman pinjam di BUMDES karena mungkin proses pinjamnya lebih mudah daripada kalo minjem ke bank ya, dan bunga pinjamannya juga tidak tinggi” (Sumber: Wawancara dengan Ibu Rika, Ketua BUMDES tanggal 14 September)

Ibu Eva selaku penanggung jawab Unit usaha Bantuan Modal Bergulir

menambahkan :

“Dalam sistem pembayarannya itu bunganya hanya 2% perbulan dalam jangka waktu pembayaran 8 bulan atau 10 bulan jadi misalnya ada yangpinjam 1.000.000, nah itu bayarnya jadi 1.200.000 dalam jangka waktu 10 bulan” (Sumber: Wawancara dengan Ibu Eva, Penanggungjawab Unit usaha Bantuan Modal Bergulir tanggal 16 September 2021)

Dalam pembayaran, sanksi yang diberikan bagi keterlambatan pembayaran masih belum tegas, seperti yang dikatakann ibu Eva:

“kalo dalam keterlambatan sanksinya gaada, ya paling cuman di ingetin aja” (Sumber: Wawancara dengan Ibu Eva, Penanggungjawab Unit usaha Bantuan Modal Bergulir tanggal 16 September 2021)

Bapak Lalan Jaelani sebagai Kepala Desa juga menambahkan :

“karena sanksinya belum tegas, jadi ada lah sebagian masyarakat yang menganggap dana pinjaman itu dana hibah, jadi pemikirannya kaya gini maenya duit pemerintah minjem kudu dibayar (masa minjem uang pemerintah harus dibayar) jadi terkadang karena orang-orang ini dananya macet” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Lalan Jaelani, Kepala Desa Panumbangan tanggal 13 September 2021)

Dari hasil wawancara dengan Ibu Tetin, beliau mengatakan bahwa unit usaha ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena dengan meminjam ke Bumdes bunga yang perlu dibayar tidak terlalu besar sehingga usahanya bisa lebih berkembang lagi.

Tabel 1. Daftar Peminjam Unit Usaha Bantuan Modal Bergulir

NO	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Pinjaman
1	Misbah	Kerajinan Tudung	5.000.000
2	Neneng	Kerajinan Tudung	5.000.000
3	Rani	Pulsa	2.000.000
4	Mely	Pulsa	3.000.000
5	Tika	Berdagang Gorengan	1.000.000
6	Juju	Warung Sembako	7.000.000
7	Anwar	Pulsa	1.500.000
8	Bibih	Berdagang Gorengan	1.000.000
9	Tetin	keripik	500.000

NO	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Pinjaman
10	Sera	Pulsa	1.000.000

Sumber: Hasil wawancara penelitian

Tabel 1 menjelaskan masyarakat yang meminjam di BUMDES Munggaran pada tahun 2021, modal tersebut digunakan untuk menjalankan beberapa usaha masyarakat.

Kedua, Bantuan Pembangunan Prasarana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bumdes Munggaran ibu Rika, beliau menuturkan:

“kalo dalam pembangunan tempat produksi belum yah, tapi kalo untuk bantuan alat produksi kita sudah lakukan. Produk unggulan dari Bumdes ini kan produksi abon ayam, jadi dari Bumdes ada bantuan untuk alat produksi abon” (Sumber: Wawancara dengan Ibu Rika, Ketua BUMDES tanggal 14 September)

Selaras dengan penuturan dari Ibu Rika, penanggung jawab Unit UEP sekaligus pelaku usaha abon ayam Ibu Midah juga membenarkan hal tersebut dalam wawancaranya, yaitu:

“dari Bumdes dikasih bantuan modal berupa uang juga dikasih alat-alat untuk produksi diantaranya mesin suwir daging ayam, alat pres abon, blender, dan juga kompor semawar. Karena kan di dua tahun awal alat produksi masih manual, jadi kalo ada orderan lumayan banyak teh agak keteteran” (Sumber: Wawancara dengan Ibu Midah, Penanggung jawab Unit UEP dan pelaku usaha abon ayam tanggal 17 September)

“di peternakan sendiri untuk transportasi untuk mengantarkan kepasar masih dari pribadi yah, kalo dari bumdes sendiri belum ada, baru berupa bantuan modal saja dalam bentuk uang” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Uan Juansyah, Penanggung jawab Unit Kerjasama Peternakan tanggal 18 September)

Pembangunan prasarana masih belum dilaksanakan, sampai saat ini bumdes hanya membantu dalam bantuan penyediaan alat produksi yang diberikan kepada pelaku usaha abon ayam. Bantuan alat produksi tersebut diantaranya mesin suwir daging, alat pres abon, blender, dan kompor semawar.

Berdasarkan wawancara dari Bu Rika, Bu Midah dan Pak Uan bahwasanya memang bumdes telah mengutamakan untuk bantuan pembangunan prasarana dan sarana ini baik dari alat produksi dan alat transportasi dalam pemasaran produk. Tetapi mungkin masih belum maksimal karena keterbatasan dana pada 2

tahun terakhir ini dikarenakan kendala pandemi.



Sumber: Arsip Dokumentasi BUMDES Munggaran

Gambar 1. Pemberian alat produksi kepada pelaku usaha abon ayam

Gambar 1 menunjukkan pemberian bantuan alat produksi kepada ibu midah selaku pelaku usaha abon ayam yang menjadi produk unggulan BUMDES Munggaran.

Ketiga, Bantuan Pendampingan. Dalam pelaksanaan suatu program pemberdayaan proses pendampingan sangat perlu dan penting. Seperti halnya di Bumdes Munggaran ini, pada proses pendampingan dilakukan oleh ketua Bumdes sendiri, ditambah dengan diikutsertakannya para pengurus dan masyarakat dalam beberapa kali pelatihan yang diadakan.

“kalo pendampingan sih masih didampingi saya sendiri, tapi karena pengetahuan saya juga masih terbatas yah. Beberapa kali para pengurus ada yang diikutsertakan dalam pelatihan pengelolaan Bumdes, kalo untuk masyarakat sendiri kami pernah mengadakan pelatihan pengolahan pangan, pembuatan baso, tapi di tahun 2020-2021 ini belum ada pelatihan lagi” (Sumber: Wawancara dengan Ibu Rika, Ketua BUMDES tanggal 14 September)

“iya saya sering ikut pelatihan, usaha abon ayam ini juga hasil dari pelatihan yang saya ikuti, waktu itu pelatihan pengolahan pangan, jadi bikin abon, roti, dodol buah, dll. Pernah jga ikut pelatihan membuat baso dan cara pelatihan cara pemasaran produk” (Sumber: Wawancara dengan Ibu Midah, Penanggung jawab Unit UEP dan pelaku usaha abon ayam tanggal 17 September)

Ibu Eva penanggung jawab Unit Usaha Bantuan Modal Bergulir, beliau juga menambahkan:

“iya pelatihan pernah ikut, baru-baru ini pernah ikut pelatihan akuntansi

untuk mengelola keuangan bumdes, dulu juga pernah ikut pelatihan pengolahan pangan juga” (Sumber: Wawancara dengan Ibu Eva, Penanggungjawab Unit usaha Bantuan Modal Bergulir tanggal 16 September 2021)

Hasil wawancara dengan Ibu Midah, usaha produk abon ayam ini juga merupakan implementasi dari kegiatan pelatihan yang beliau ikuti, pelatihan ini tentunya sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan serta pengetahuan. Pendampingan dan pelatihan oleh Bumdes munggaran untuk pengurus dan masyarakat ini sudah dilaksanakan walaupun masih belum rutin, hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu dalam pendanaan, apalagi di satu tahun terakhir ini pelatihan belum dilaksanakan karena pendaan difokuskan untuk penanganan pandemi.

Keempat, Penguatan Kelembagaan. Bumdes Munggaran ini belum ada kemitraan dengan pihak permodalan yang lain, jadi untuk modal masih mengandalkan dari dana Desa dan hasil dari perguliran dana pinjaman modal. Dalam memasarkan produk abon ayam dan pipiti sudah ada, namun masih belum maksimal. Selain itu, Unit usaha kerjasama peternakan dalam memasarkan domba memang sudah punya pasar sendiri, jadi tidak kesulitan dalam memasarkan ternaknya.

Kelima, Penguatan Kemitraan Usaha. Kemitraan usaha Bumdes Munggaran dengan pihak lain dalam permodalan masih belum ada, tetapi Ibu Rika dalam wawancaranya mengatakan kemitraan produksi sudah ada, seperti dalam produksi abon ini bermitra dengan pengelola bantuan BPNT. Ibu Midah juga mengatakan dalam proses produksi beliau juga bermitra dengan penjual daging ayam, karena daging yang diperlukan untuk abon ayam ini daging yang segar serta hanya membutuhkan bagian dadanya saja.

“untuk kemitraan dengan bidang permodalan lain masih belum yah, paling sih kemitraan dengan pihak produksi dan distribusi, misalnya abon ayam ini bermitra dengan penjual daging ayam bisa mendapatkan harga yang lebih murah dari pasaran dengan kualitas barang yang bagus” (Sumber: Wawancara dengan Ibu Rika, Ketua BUMDES tanggal 14 September)

Sama halnya dengan penuturan Ibu Rika, hasil wawancara dengan Bu Midah beliau juga mengatakan:

“iya produksi abon ayam bermitra dengan yang lain, kalo dalam pembuatan abon kan bagian dada ayamnya saja yang digunakan, jadi gak semua penjual ayam bisa ngasih kalo beli cuman dada ayamnya aja apalagi misalkan belinya itu lebih dari 10 kg, jadi saya ada kemitraan dalam proses produksi dari penjual daging ayam. Kalo dalam pendistribusian sih masih belum tetap yah,

tahun lalu alhamdulillah tuh dapet orderan abon banyak sekitar 1700an pcs bekerja sama dengan pengurus bantuan BPNT, saya juga masukin produk abon ayamnya ke warung-warung kecil maupun ke toko di pasar” (Sumber: Wawancara dengan Ibu Midah, Penanggung jawab Unit UEP dan pelaku usaha abon ayam tanggal 17 September)

Kemitraan usaha ini sangat penting dalam proses pengembangan usaha, juga melalui kemitraan dalam proses produksi, pendistribusian ini akan dapat memberdayakan semua pihak.

Faktor Penghambat Implementasi Program Bumdes Munggaran dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat

Menurut teori yang dikemukakan Adamson (2013) dalam Jurnal Ristiana dan Amin Yusuf “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Wisata Lerep” (2020: 99) bahwa dalam suatu proses pemberdayaan salah satu hambatan utamanya adalah faktor dari tingkat kapasitas masyarakat, bagaimana partisipasi masyarakat dalam suatu program pemberdayaan masyarakat, ada 2 jenis faktor penghambat dalam proses pemberdayaan yaitu:

Pertama, faktor penghambat internal. Seperti yang disampaikan bapak kepala Desa bahwa faktor penghambat dari dalam ini adalah pengetahuan para pengurus tentang Bumdes yang masih terbatas, sehingga menyebabkan program Bumdes masih belum dilaksanakan secara maksimal. Selaras dengan hal itu Ibu Rika juga menambahkan bahwasanya latar belakang pendidikan para pengurus juga sangat mempengaruhi dalam tingkat pengetahuan tentang Bumdes ini. Oleh karena itu, para pengurus diikut sertakan dalam pelatihan pengelolaan Bumdes dalam beberapa kali kesempatan untuk dapat menambah khazanah keilmuan tentang Bumdes.

“faktor penghambat ya dari SDM sih, para pengurus ini kan bisa dibilang masih baru yah, pengetahuan tentang bumdes juga masih belum banyak” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Lalan Jaelani, Kepala Desa Panumbangan tanggal 13 September 2021)

Ketua Bumdes Munggaran juga menuturkan hal serupa, ia mengungkapkan hal sebagai berikut:

“kemampuan SDM memang masih kurang, ya dari latar belakang pendidikannya pun bukan sarjana, jadi ya wajar aja sih masih pada awam tentang Bumdes ini, jadi pas awal-awal agak kesulitan dalam pelaksanaan program” (Sumber: Wawancara dengan Ibu Rika, Ketua Bumdes Munggaran tanggal 14 September 2021)

Kedua, faktor penghambat eksternal. (a) Minimnya anggaran dana yang

disediakan. Pada awal mula berdirinya Bumdes Munggaran ini desa memberikan modal awal sebesar 21.000.000 dan dana tersebut dikelola perunit usaha seperti yang dikatakan Ibu Rika pada wawancaranya. Dari tahun 2015-2019 anggaran dana desa untuk Bumdes cukup signifikan setiap tahunnya dianggarkan sebesar 100.000.000. tetapi pada 1 tahun terakhir ini desa hanya menggabungkan 45.000.000 karena dana desa di fokuskan pada penanganan pandemi. Selain karena tahun ini ada pandemi, minimnya dana disebabkan karena macetnya perguliran dana bantuan modal.

“ya sebetulnya dari tahun 2015-2019 itu anggaran dana desa untuk Bumdes cukup signifikan setiap tahunnya 100.000.000 saya juga baru menjabat sebagai kepala desa tahun 2018, tetapi memang dananya ini agak macet perputarannya karena beberapa ada yang macet di pinjaman, dan di 2 tahun terakhir ini anggaran untuk bumdes hanya 45.000.000 karena adanya pandemi jadi anggaran dana desa lebih difokuskan ke penanganan pandemi, sehingga untuk anggaran bumdes tidak seperti tahun-tahun sebelumnya” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Lalan Jaelani, Kepala Desa Panumbangan tanggal 13 September 2021)

(b) Kurangnya Kepercayaan Masyarakat. Respon masyarakat terhadap hadirnya Bumdes Munggaran ini cukup beragam, banyak yang menyambut baik walaupun masih banyak juga masyarakat yang masih awam tentang Bumdes ini. Seperti wawancara dengan Ibu Tetin beliau mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang awam tentang bumdes, padahal pemerintah desa sering memberitahukan tentang Bumdes ini di beberapa kesempatan. Ibu Rika mengatakan respon masyarakat terhadap unit usaha bantuan modal bergulir masih ada masyarakat yang menganggap bahwa dana ini dana hibah, sehingga menyebabkan kemacetan dalam pembayaran.

“respon masyarakat terhadap bumdes ini memang masih kurang ya, seperti dalam pinjaman saja gitu ya masyarakat ada yang menganggap dana hibah, jadi ini yang bikin macet di perguliran dana, dan masih banyak masyarakat belum paham posisi Bumdes untuk dikembangkan bersama dan dimiliki bersama” (Sumber: Wawancara dengan Ibu Rika, Ketua Bumdes Munggaran tanggal 14 September 2021)

Tetapi pada unit usaha kerjasama peternakan minat masyarakat semakin meningkat seperti yang dituturkan oleh Bapak Kepala Desa.

“respon masyarakat banyak sebenarnya, ada yang menyambut baik ada yang biasa-biasa aja, tapi kalo sekarang sih alhamdulillah yah di peternakan banyak masyarakat yang ikut bergabung” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Lalan Jaelani, Kepala Desa Panumbangan tanggal 13 September

2021)

Dari hasil wawancara tersebut pada kenyataannya memang respon masyarakat ini berbeda-beda terhadap hadirnya Bumdes, tidak semua anggota masyarakat dapat ikut berpartisipasi, dengan berbagai macam alasan yang ada. Hal ini dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang mungkin membuat mereka terdorong atau tidak untuk ikut berpartisipasi.

Keberhasilan implementasi Program Bumdes Munggaran dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat

Dalam implementasi program pemberdayaan ada lima indikator keberhasilan, sesuai teori yang kemukakan oleh Gunawan Sumodiningrat (1999) dikutip dari skripsi Mami Suciati "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sekolah Perempuan: Studi terhadap PNPM Peduli-Lakpesdam NU Bantul (2014: 14) yaitu:

Pertama, berkurangnya jumlah penduduk miskin. Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bumdes Munggaran ini merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan di Desa Panumbangan, dengan adanya bantuan modal bergulir ini masyarakat dapat memulai usaha dan mengembangkan usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatannya, pelatihan dalam pengolahan pangan juga sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah ilmu dalam memproduksi suatu produk, serta kerjasama peternak.

"dibidang berkurang sih ya tidak terlalu signifikan, tapi kalo untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari masyarakat masih bisa walaupun sederhana, walaupun memang masih ada yang belum bisa memenuhi kebutuhan pokok dasarnya" (Sumber: Wawancara dengan Bapak Lalan Jaelani, Kepala Desa Panumbangan tanggal 13 September 2021)

Program pemberdayaan Bumdes Munggaran ini belum sepenuhnya mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di Desa Panumbangan. Seperti yang dikatakan Bapak Kepala Desa dalam wawancaranya bahwa memang masih banyak masyarakat miskin namun dalam memenuhi kebutuhan pokoknya mereka masih bisa karena dikampung cenderung biaya hidup yang murah.

Kedua, berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

"ya sekarang sudah sedikit berkembang, banyak masyarakat mulai memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah Desa Panumbangan seperti bambu di buat kerajinan pipiti besek , tudung, dll. Ada banyak juga yang memanfaatkan sumber pangan seperti pembuatan keripik dari singkong dan talas, walaupun peningkatan pendapatannya tidak terlihat signifikan tapi mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya"(Sumber: Wawancara dengan Bapak

Lalan Jaelani, Kepala Desa Panumbangan tanggal 13 September 2021)

“walaupun masih sedikit yah, tapi memang ada perkembangan dari masyarakat. Sekarang sudah mulai menyadari untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar, ya walaupun usaha kecil tapi mereka setidaknya dapat pendapatan” (Sumber: Wawancara dengan Ibu Rika, Ketua Bumdes Munggaran tanggal 14 September 2021)

Bapak Uan Juansyah menambahkan:

“sekarang sudah banyak masyarakat yang mulai beternak domba, jadi ya ada sedikit simpanan masyarakat di ternak” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Uan Juansyah, Penanggung jawab Unit Kerjasama Peternakan tanggal 18 September)

Selain itu Bumdes Munggaran juga memberikan bantuan uang dan juga peralatan kepada masyarakat untuk memproduksi dan berjualan produknya dengan memanfaatkan sumber pangan lokal. Bantuan tersebut diberikan untuk meningkatkan pendapatan, walaupun pada kenyataannya usahany belum dapat berkembang secara makasimal.

Ketiga, meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya. Dalam pemberdayaan masyarakat tentunya hal sangat penting adalah partisipasi dari masyarakat baik dalam proses perencanaan maupun dalam pelaksanaan program. Pelaksanaan program Bumdes Munggaran dilakukan bersama dengan masyarakat Desa Panumbangan sebagai upaya dalam mengembangkan usaha dan ekonomi masyarakat. Setelah program direncanakan, Bumdes Munggaran melakukan sosialisasi dan musyawarah bersama dengan masyarakat sebelum program dilaksanakan. Kemudian program tersebut dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat. Sebagian besar masyarakat sudah sering menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut. Misalnya Ibu Midah dan Ibu Tetin yang cukup sering mengikuti pelatihan pengolahan pangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Panumbangan memiliki kepedulian yang cukup tinggi terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.

Keempat, meningkatnya kemandirian kelompok. Menurut Ibu Rika, pelaku usaha di Desa panumbangan cukup meningkat, abon ayam, pengrajin pipiti besek, pengrajin tudung, warung sembako, jualan pulsa, gorengan, dll.

“ya sampai saat ini, pelaku usaha lumayan meningkat produk unggulan dari Bumdes ada abon ayam, ada pengrajin pipiti bambu, ada juga pelaku usaha seperti warung sembako, berjualan pulsa, berjualan gorengan, ada juga yang baru mulai usahanya, baik itu usaha kecil maupun sedang” (Sumber:

Wawancara dengan Ibu Rika, Ketua Bumdes Munggaran tanggal 14 September 2021)

Bumdes Munggaran telah mengupayakan dalam pelatihan produksi dan penjualan makanan untuk dapat mengembangkan usaha masyarakat. Ibu Midah juga mengatakan, dengan adanya pelatihan tersebut beliau dapat mengaplikasikannya sehingga dapat membuat dan mengembangkan usaha produksi abon ayamnya.

“ya alhamdulillah usaha abon ayam ini dirintis dari nol dan sekarang sudah terlihat hasilnya, sudah punya SPP-IRT dan juga label halal, alhamdulillah usahanya ada kemajuan walaupun tidak terlihat signifikan, lumayan sudah banyak yang mengenal produksi abon ayam kami” (Sumber: Wawancara dengan Ibu Midah, Penanggung jawab Unit UEP tanggal 17 September 2021)

Bumdes Munggaran juga membantu dalam modal dan bantuan peralatan. Dari pernyataan tersebut kemandirian kelompok masyarakat sudah ada, namun memnag masih belum seluruhnya masyarakat sadar, masih ada juga masyarakat yang menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain sehingga usaha nya tidak dapat berkembang.

Kelima, meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan. Salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan adalah meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan keluarga miskin yang dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya. Selain hal tersebut, meningkatnya kapasitas masyarakat dapat dilihat dengan bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat. Menurut Ibu Rika, bantuan yang diberikan Budes Munggaran dalam produksi dan penjualan produk makanan seharusnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi memang usaha tersebut kurang maksimal karena ada sebagian masyarakat yang tidak memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik.

“sebagian besar masyarakat sudah bisa memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya, dari bumdes juga kan ada bantuan modal peralatan ya walaupun dalam pemanfaatannya masih belum berkembang maksimal” (Sumber: Wawancara dengan Ibu Rika Surtikaningsih, Ketua Bumdes Munggaran tanggal 14 September 2021)

“untuk pendapatan masyarakat sih yang saya lihat yah sebagian besar kalo dalam pemenuhan kebutuhan pokok sih masih mampu, walaupun dengan penghasilan yang kecil, ya namanya dikampung kan biaya hidup juga tidak terlalu mahal, kalo untuk makan istilahnya mah gak perlu beli semua gitu. Pelatihan yang saya ikuti juga lumayan lah menambah pengetahuan dan

wawasan saya” (Sumber: Wawancara dengan Ibu Tetin anggota Bantuan Modal Bergulir tanggal 16 September)

Selaras dengan hal tersebut, Pak Lalan selaku Kepala Desa juga menuturkan, bahwasanya:

“ya meningkat sih kalo dari pendapatan walaupun tidak signifikan, dari pelatihan yang dilaksanakan Bumdes kan diharapkan dapat meningkatkan pnghasilan masyarakat, walaupun pada prakteknya masih belum berkembang maksimal ya” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Lalan Jaelani, Kepala Desa Panumbangan tanggal 13 September 2021)

Walaupun demikian, menurut Ibu Tetin dan Pak Lalan, program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan Bumdes Munggaran di Desa Panumbangan dapat menambah pengalaman dan khazanah keilmuan dalam berbagai kegiatan pelatihan yang dilaksanakan melalui program pemberdayaan Bumdes Munggaran.

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Bumdes Munggaran dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu : Proses implemantasi program Bumdes Munggaran dalam mengembangkan usaha dan ekonomi masyarakat yaitu: *Pertama*, Dengan adanya Unit Usaha Bantuan Modal Bergulir, masyarakat sangat terbantu karena syarat peminjaman yang mudah, bunga yang kecil , dan proses pencairan dana tidak lama. *Kedua*, Bumdes Munggaran memberikan bantuan modal dan peralatan produksi pada para pelaku Usaha di Desa Panumbangan. *Ketiga*, Pendampingan dilakukan Ibu Ketua Bumdes dan para pengurus diikutsertakan dalam pelatihan pengelolaan Bumdes untuk menambah wawasan dan pengalaman tentang Bumdes. *Keempat*, Bumdes Munggaran dalam permodalan masih belum bekerja sama dengan pihak lain dan mengandalkan dana desa dan perguliran dana di Bumdes sendiri. *Kelima*, Kemitraan Usaha Bumdes dalam produksi dan pendistribusian sudah terjalin, sehingga dengan hal ini dapat memberdayakan semua pihak.

Namun pada proses implementasi program Bumdes Munggaran dalam mengembangkan usaha dan ekonomi masyarakat ini tentunya ada beberapa faktor penghambat diantaranya: *Pertama*, faktor penghambat dari dalam. Faktor ini di tandai dengan kapasitas para pengurus Bumdes yang masih memiliki pengetahuan tentang Bumdes yang terbatas, selain itu juga latar pendidikan yang rendah juga mempengaruhi dalam keberlangsungan implementasi program Bumdes Munggaran. *Kedua*, faktor penghambat dari luar yaitu minimnya anggaran dana

yang disediakan sehingga pemberian modal kepada pelaku usaha terbatas. Kurangnya kepercayaan masyarakat membuat program pemberdayaan sulit terlaksana dengan maksimal.

Adapun keberhasilan Program Bumdes Munggaran dalam mengembangkan usaha dan ekonomi masyarakat diantaranya: (1) Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan Bumdes Munggaran belum dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Desa Panumbangan secara signifikan. (2) Program pemberdayaan masyarakat Bumdes Munggaran sudah mampu membantu masyarakat Desa Panumbangan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya, tetapi bantuan dari Bumdes masih belum dikembangkan secara maksimal oleh masyarakat. (3) Program pemberdayaan ini sudah berhasil meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. Hal tersebut tampak dari masyarakat yang cukup sering mengikuti kegiatan-kegiatan dalam program yang dilaksanakan oleh Bumdes Munggaran. (4) Program pemberdayaan masyarakat Bumdes Munggaran sudah dapat meningkatkan kemandirian kelompok masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari tercipta dan berkembangnya produk unggulan Bumdes yaitu abon ayam yang merupakan hasil implementasi dari program pelatihan yang dilaksanakan Bumdes Munggaran. (5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bumdes Munggaran belum sepenuhnya dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan. tetapi, program pemberdayaan tersebut dapat menambah pengalaman dan wawasan kepada masyarakat.

Untuk kedepannya, hendaknya pemerintah Desa melakukan peningkatan kerjasama dengan perusahaan dan pengembang lain. Kerjasama ini dilakukan untuk bantuan dana maupun kerjasama yang lain guna membantu pelaksanaan program Bumdes Munggaran. Bagi pengelola Bumdes perlunya melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui program Bumdes Munggaran sehingga tidak ada kesalah pahaman antara masyarakat dengan Pemerintah desa dan Pengelola Bumdes. Sanksi yang tegas juga perlu dibuat bagi para peminjam modal yang tidak taat membayar, hal ini agar perguliran dana Bumdes dapat berputar dengan baik. Bagi masyarakat Desa Panumbangan diharapkan dapat memiliki keterbukaan terhadap adanya program kegiatan Bumdes Munggaran dan juga dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan bermanfaat yang dilaksanakan oleh Bumdes Munggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiah, I. (2013). Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat. *Jurnal Academica Fisip Untad*, 5(2), 1087
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik*

- Desa (BUMDes)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Herawati, E. (2018, Oktober). Badan Usaha Milik Desa, Status dan Pembentukannya. Diperoleh dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/16/badan-usaha-milik-desa-status-dan-pembentukannya/>
- Herdiana, D. (2019). Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 6(1), 77.
- Hutomo, M. Y. (2000). Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi: Tinjauan teoritik dan implementasi. Diperoleh dari https://www.bappenas.go.id/files/2913/5022/6062/mardi__20091015151035__2384__0.pdf
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48), 2
- M. Prawiro. (2018, Oktober 14). Pengertian Peran: Arti, Konsep, Struktur, dan Jenis Peran. Diperoleh dari <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>,
- Peraturan Pemerintah NO 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021>
- Pusat Data dan Informasi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi. https://www.kemendes.go.id/berita/content/detail_infografis/Jumlah%20bumdes%20tahun%202014-2018,
- Sadiah, D. (2015). *Metode Penelitian Dakwah (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Samadi, S., Rahman, A., & Afrizal, A. (2015). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Mahasiswa Prodi Manajemen UPP*, 2(1), 2.
- Seyadi. (2003). *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suciati, M. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sekolah Perempuan: Studi terhadap PNPM Peduli-Lakpesdam NU Bantul. (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia). Diperoleh dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11556/2/BAB%20I,%20IV,%20DAFTAR%20PUS-TAKA.pdf>

Nadila Fauziah, A. Bachrun Rifa'i

- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sujarweni, V. W. (2020). *Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.